

## MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI) DI TENGAH ISU PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Studi Analisis Teori Gerakan Sosial)

**Qomaruzzaman, BSS., BAA.**

*Pengajar Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)  
Universitas Muhammadiyah Purworejo Jateng*

**Abstrak :** *Majelis Mujahidin muncul ke permukaan tidak semata-mata karena aspek yang bersifat situasional (konteks sosial, struktural, dan kultural). Tetapi munculnya MMI karena dorongan keyakinan dan paham keagamaan yang ingin mencetak- ulang (reproduksi) tipe ideal Islam zaman Nabi dan generasi “Salâf al-Shâlih” (generasi terbaik sesudah Nabi) secara harfiah dan formal. MMI menganut paham ideologis (Islamisme, Ideologi Islam) yang bertolak dari pandangan integralisme Islam. Gerakan Islam MMI merupakan penjelmaan dari reproduksi (cetak-ulang) Revivalisme dan Neorevivalisme Islam yang cenderung tradisional dan konservatif sebagaimana ditemukan dalam gerakan Wahhabiyah, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyyah di Taliban. Gerakan MMI dalam perspektif psikologi sosial lahir dalam bingkai/framing perasaan tidak adil atas perlakuan terhadap suatu kelompok partisipan, identitas kelompok yang mendefinisikan “kita” sebagai korban ketidakadilan oleh kelompok sosial lain, rezim, dan agensi. Perasaan ini dirasakan bersama oleh suatu kolektivitas umat karena Islam sebagai identitas.*

**Kata Kunci :** MMI, Gerakan Sosial, Formalisasi Syariat.

### **Pendahuluan**

Transisi demokrasi Indonesia pascareformasi mengubah wajah perpolitikan Indonesia. Kondisi negara yang tidak karuan menuntut

### **IN RIGHT**

Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia

Vol. 3, No. 1, 2013

berbagai pihak merasa perlu untuk mendesakkan demokrasi, kebebasan, transparansi, akuntabilitas publik berkaitan dengan seluruh tananan masyarakat. Tak ayal pertentangan dan konflik sosial terus terjadi. Berbagai kepentingan, baik yang mendasari atas nama bangsa dan kelompok tertentu, juga ikut mewarnai.

Terbukanya katub-katub kebebasan dalam berpendapat, berkumpul, dan berserikat menjadi salah satu pendorong menguatnya gerakan masyarakat sipil. Di satu sisi, gerakan ini menjadi harapan karena mampu mendorong dan menjadi stabilisator pemerintahan, namun di saat yang lain semakin mengancam. Kegetiran masyarakat atas berbagai persoalan terutama dalam hal ekonomi, politik, dan degradasi moral menjadikan masyarakat mencari alternatif baru.

Pada era reformasi, menguatnya pemikiran politik Islam dan juga munculnya reaksi balik dari berbagai kelompok yang bersebrangan memunculkan tiga kubu dalam masyarakat. *Pertama*, menginginkan legalitas politik Islam dalam sistem negara. Kelompok ini dikenal dengan kelompok simbolis, yakni berpegang pada model legalitas simbol-simbol Islam. *Kedua*, kelompok yang menolak masuknya sistem Islam dalam negara, namun merasa perlu memasukan etos atau spirit Islam dalam mendasari sistem negara. Kalangan ini dikenal dengan kelompok subtansialis. *Ketiga*, adalah kelompok yang membedakan antara kawasan pribadi dan publik dalam kenegaraan. Agama adalah wilayah pribadi yang tidak dapat dicampurkan dalam sistem publik, negara. Kelompok ini kemudian dikenal dengan kelompok liberal.<sup>1</sup>

Kelompok pertama menyakini bahwa kegagalan bangsa Indonesia membangun negara yang kuat adalah karena sistem yang dianut adalah sistem negara sekuler. Kelompok ini dapat dibaca dari munculnya gerakan politik Islam dengan berbagai isu aktual seperti

---

<sup>1</sup> Karuni Ayu Sawitri "Membaca Politik Islam Indonesia Kontemporer" [http://nu.or.id/page/id/dinamic\\_detil/12/13749/Buku/Membaca\\_Politik\\_Islam\\_Indonesia\\_Kontemporer.html](http://nu.or.id/page/id/dinamic_detil/12/13749/Buku/Membaca_Politik_Islam_Indonesia_Kontemporer.html), akses 12 Desember 2011.

penegakan syariat, negara Islam, khilafah Islamiyah, masyarakat madani, dan gerakan-gerakan pelegal-formalan Islam dalam kehidupan politik. Bagi kelompok pertama ini, Islam menjadi solusi atas segala krisis bangsa, kepemimpinan, ekonomi, relasi sosial dalam masyarakat dan moralitas.

Masyarakat Indonesia perlu mengambil pedoman hidup dari inti sari nilai-nilai Islam dan praktik kenegaraan Islam masa Rasulullah. Pemahaman-pemahaman sebagaimana disebut, melahirkan banyak model varian gerakan Islam di Indonesia saat ini. Salah satu varian kelompok ini adalah Majelis Mujahidin Indonesia. MMI secara tegas menyatakan bahwa sangat penting formalisasi agama dalam sistem sosial politik Indonesia. Bagi Majelis Mujahidin, syariat Islam perlu ditegakkan dalam kehidupan umat Islam. Penegakan syariat Islam tersebut terutama dari dalam dirinya sendiri (*ibda' binafsi*) umat Islam dan kemudian keluar.<sup>2</sup>

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) lahir melalui kongres Mujahidin I yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 5-7 Agustus 2000. Hasil kongres ini mengamanahkan kepada 32 tokoh Islam Indonesia yang tercatat sebagai *Ahl al-Hall wa al-'Aqdi* (AHWA)<sup>3</sup> untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam melalui wadah yang disebut Majelis Mujahidin. MMI bermarkas pusat di Jl. Karanglo, Kotagede dengan perwakilannya di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.

Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia mempunyai misi perjuangan demi tegaknya syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*)

---

<sup>2</sup> Lihat. [www.Arrahmah.com](http://www.Arrahmah.com), akses 10 Januari 2012.

<sup>3</sup> *Ahl al-Hall wa al-'Aqdi* (AHWA) adalah tokoh-tokoh Islam (versi MMI) yang ditunjuk Kongres Mujahidin untuk mengemban amanat kongres. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* tersebut dikoordinir oleh seorang ketua yang disebut sebagai Amirul Mujahidin. Sedangkan dalam operasionalnya AHWA memiliki pengurus harian dan forum pleno yang keduanya dipimpin oleh amirul mujahidin. Adapun dalam bentuk melaksanakan tugasnya AHWA membentuk Lajnah Tanfiziyah di Pusat, lajnah perwakilan wiayah Provinsi, kabupaten-kotamadya. Hartono, "Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2010), p. 180.

dengan cara pengamalan syariah harus dilakukan secara bersih dan benar, jauh dari kemusyrikan. Dan syariat Islam wajib ditegakkan secara menyeluruh (*kaffah*) di semua bidang kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan masalah individual-ritual (*mahdhab*), atau masalah sosial-kenegaraan seperti memilih pemimpin, menetapkan hukum positif, dan mengatur kehidupan ekonomi negara.<sup>4</sup>

Majelis Mujahidin menyatakan dirinya sebagai gerakan yang peduli dengan perbaikan Negara dan kehidupan masyarakat dengan jalan dan metode yang benar untuk merealisasikannya. Dari itu, Majelis Mujahidin bermaksud menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum Islam (mujahidin). Tujuannya adalah untuk bersama-sama berjuang menegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga syariat Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional.

### **Arah Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia**

Perjuangan utama Majelis Mujahidin Indonesia ialah penegakan syariat Islam secara menyeluruh, memperjuangkan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 yang dipandang pencoretan tujuh kata di masa lalu tersebut sebagai penghianatan terhadap umat Islam, mendukung adanya Negara Khilafah untuk pemberlakuan syariat Islam, menggalang aliansi kepada seluruh komponen umat Islam untuk menagakan syariat Islam, anti terhadap ideologi lain di luar Islam dan anti Amerika Serikat yang sangat keras, serta memandang orang Islam yang tidak mendukung formalisasi syariat Islam dalam Negara sebagai murtad (*kafir i'tiqad*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Salah satu bentuk kemusyrikan yang dimaksud MMI ialah sistem demokrasi sekuler yang meninggalkan/menolak Allah swt sebagai sumber hukum. Lihat "Hartono, "Kontestasi, p. 182.

<sup>5</sup> Haedar Nashir, "Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia", dalam *Jurnal Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2 (November 2006). p. 60.

Majelis Mujahiddin memperjuangkan formalisasi syariat dalam institusi negara/pemerintahan hingga ke pembentukan Negara Khilafah karena memiliki sistem keyakinan atau pandangan dunia dalam paham integralisme Islam. Keyakinan dan pemahaman ajaran Islam tersebut harus secara total dan harus sebagai satu totalitas dalam seluruh aspek kehidupan Muslim baik secara individual maupun kolektif, termasuk dalam kehidupan negara. Konsep-konsep pokok yang dikembangkan MMI ialah penegakan syariat Islam, Negara Islam atau Negara Khilafah atau Kekhalifahan Islam, *Dār al-Islām* versus *Dar al-Harb*, Sistem Islam, Ideologi Islam, dan lain-lain.<sup>6</sup> Gerakan MMI ini bukan hanya meyakini syariat Islam sebagai tuntunan Islam yang mutlak kebenarannya,<sup>7</sup> tetapi juga wajib dijalankan oleh setiap Muslim dalam seluruh aspek kehidupan tanpa kecuali. Tidak ada satu hal urusan dunia yang luput dari ajaran atau syariat Islam. Karena itu, setiap Muslim yang menentang syariat Islam, termasuk menolak penerapannya secara formal dalam kehidupan negara, tergolong dalam kategori murtad atau kafir secara *i'tiqad* (keyakinan akidah). Bersamaan dengan ini, MMI juga menentang ajaran dan ideologi lain yang bertentangan dengan syariat Islam.

### **Karakter Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia**

Gerakan Majelis Mujahidin menunjukkan pada karakter, manifestasi, dan konteks yang bertipikal legalistik-formalistik, doktriner, dan militan. Legalistik-formalistik yakni kecenderungan menampilkan Islam serba harfiah (tekstual, skriptural) dan sesuai dengan tata aturan yang sah (legal, resmi) sebagaimana tuntunan hukum syariat atau fikih Islam.

Doktriner kecenderungan memahami dan mempraktikkan Islam serba mutlak dan kaku karena itulah Islam yang *kaffah* sebenarnya sebagaimana diyakininya (ranah pemikiran sekalipun seperti

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Karena datang dari Allah dan menjadi misi para Nabi utusan Allah

demokrasi, juga ideologi liberalisme, sosialisme, sekularisme, dan ideologi lainnya yang “*man made*” (buatan manusia) diletakkan dalam pandangan doktrin, sehingga dihukumi haram dan bahkan sebagai “sistem kufur”. Dan militan dengan menunjukkan sikap keagamaan yang bersemangat tinggi hingga berhaluan keras. Watak keras yang ditampilkan oleh MMI ini lebih pada pandangan aqidah dan sikap keagamaan dalam memposisikan orang lain baik sesama Muslim maupun non-Muslim seperti memvonis munafik, murtad, dan kufur, tetapi tidak melakukan kekerasan fisik.<sup>8</sup>

Karakter legalistik-formalistik, doktriner, dan militan yang menjadi ciri khas MMI tersebut menjadi bagian yang melekat dalam sistem keyakinan atau pandangan dunia Islam yang dibangun dan didukung oleh tiga aspek penting seperti: pandangan Islam berbasis syariat, yang dibangun di atas prinsip dan berorientasi serba hukum atau fikih Islam dalam logika “*al-ahkâm al-khamsah*” (lima prinsip hukum) yaitu wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah sehingga melahirkan kacamata Islam serba hitam-putih; yang berbeda secara kontras dengan pandangan Islam hakikat.

Adanya *world-view* Islam yang integralistik (integralisme Islam), yang mempertautkan secara langsung syariat Islam dengan seluruh dimensi kehidupan, yang mengharuskan Islam diwujudkan menjadi Sistem Islam (*al-Nidhâm al-Islamiy*), termasuk formalisasi Islam dalam institusi negara/pemerintahan hingga ke pembentukan negara Islam. Dan didukung oleh situasi-situasi sosial dan kondisi struktural kehidupan yang dialami dan berada di sekitar kelompok Islam syariat itu menjalani kehidupan dengan berbagai masalah dan dinamika yang mengitarinya.<sup>9</sup>

Dalam konteks teologis dan ideologis yang demikian militan dan doktriner itulah maka MMI memiliki dinamika inti yang menjadi kekuatan terdalam dan menjadi semangat dasar yang selalu

---

<sup>8</sup> *Ibid.* p. 63.

<sup>9</sup> *Ibid.* p. 64.

menggerakkan daya hidup para pengikutnya. Dinamika inti gerakan itu ialah sistem keyakinan tentang syariat Islam sebagai ajaran utama yang mendarah daging dalam alam pikiran para pemeluknya, yang secara sadar atau tidak disadari telah mengkristal dan menjadi pandangan hidup (*world-view*) kelompok Majelis Mujahidin.

Kelompok Islam syariat seperti Majelis Mujahidin menjadikan syariat Islam sebagai ajaran yang pokok atau utama dan menjadi tema sentral gerakannya, sehingga melahirkan sikap serba syariat (*syar'isme*) atau syariat *mindedness*. Syariat Islam dipahami dan diwujudkan dalam dua dimensi sekaligus, *pertama* sebagai hukum Islam yang wajib dijalankan dan bersifat sakral dan sebagai *manbaj al-hayat* (*Islamic way of life*) dalam kehidupan kaum Muslim, maupun dalam konteks lain diidentikkan dengan agama (*dan al-Islam*), sehingga selalu memiliki dalih keagamaan dan ruang sosial-keagamaan yang leluasa untuk diperjuangkan dalam kehidupan umat Islam.<sup>10</sup>

Konsepsi yang dibangun MMI adalah bahwa syariat Islam baik secara khusus (hukum Islam) maupun umum (agama Islam) dikonstruksi atau ditafsirkan sebagai tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, sehingga Islam tampil sebagai seperangkat tuntunan, yang menjadikan ajaran ini lebih menyempit serta menampilkan corak Islam serba legalistik-formalistik, doktriner, dan mutlak sebagaimana karakter dasar syariat. Dari karakter seperti itulah, MMI berkeyakinan kuat bahwa syariat Islam wajib dijalankan oleh setiap Muslim individu maupun kelompok, termasuk dalam institusi negara dan terbentuknya Negara Khalifah.

Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, meyakinkan kepada seluruh umat Islam bahwa melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* adalah wajib bagi setiap muslim, bahkan Islam mengharuskan umatnya mendirikan negara agar syariah Islam dapat berfungsi dengan baik,

---

<sup>10</sup> Marshall G.S. Hudgson, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik*, terjemahan (Jakarta: Paramadina, 2002), p. 179 dalam Nashir, "Gerakan Islam.", p. 65.

dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>11</sup> Terdapat tiga alasan mengapa MMI mengusung misi syariat Islam harus ditegakkan di negeri Indonesia sehingga melahirnya Kongres Mujahidin I tahun 2000, yaitu :

1. Alasan aqidah (ideologis), di mana setiap muslim yang lurus aqidahnya pastilah menginginkan berlakunya syariat Islam sebagai konsekuensi logis dari pengakuannya sebagai muslim, sehingga mereka terbebas dari bencana dan malapetaka, kehancuran, dan kebinasaan.
2. Alasan historis (*sirah*), di mana perjalanan sejarah umat Islam sejak zaman Rasulullah hingga Khulafa al-Rasyidun dan Khalifah-khalifah sesudahnya, yang mereka itu para Tabi'in dan *salafus shalih* hingga akhir runtuhnya khilafah Utsmaniyah di bawah Sultan Abdul Hamid II tahun 1924 M., mereka semua hidup dalam sistem Islam, yaitu khilafah dengan tetap menjaga *wibdatul ummat* dan *wibdatul imāmah*.
3. Alasan realitas zaman, yakni berkenaan dengan kenyataan hidup masa kini dengan munculnya era globalisasi yang justeru diwarnai dengan krisis multidimensional yang berkepanjangan, maka saatnya umat Islam dituntut untuk lebih berani menawarkan mutiara Alquran dan Alhadits dengan tanpa ragu dan minder demi mengatasi segala macam problema yang menimpa umat manusia.<sup>12</sup>

Gerakan formalisasi syariai Islam sebagaimana ditunjukkan oleh MMI, memiliki *nasab* pemikiran dengan gerakan-gerakan Islam yang bercorak Islamisme atau belakangan sering diidentifikasi sebagai fundamentalisme Islam atau lebih tepatnya Neorevivalisme Islam dan Islamisme. Konsep Sistem Islam (*al-Nidzām al-Islāmī*) dan Islam *kaffah*, *Minhāj al-Hayāt* (sistem kehidupan), termasuk idiom-

---

<sup>11</sup> Irfan Suryahardi Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), p. 151 dalam *Ibid.*, p. 66.

<sup>12</sup> *Ibid.* p. 193-194.



idiom kunci dari MMI yang menyertai isu utama tentang penerapan syariat Islam dan kekhalifahan Islam.

Bagi MMI perjuangan membangun sistem Islam dapat terlaksana secara lebih kokoh dan sistematis jika menempuh jalur perjuangan struktural melalui pelebagaan ke dalam Negara secara legalistik-formalistik. Dengan kata lain, Gerakan Islam yang berpandangan integralisme Islam sebagaimana dipaparkan di atas, yang ingin membangun sistem Islam secara total, termasuk dalam kehidupan politik atau negara, hingga batas tertentu selain memiliki orientasi idealisasi Salafiyah ke masa lampau di zaman Nabi dan generasi terdekat sesudahnya, juga menyerupai pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin di Mesir, Jamaah Islamiyah di Pakistan, dan dalam fenomena mutakhir yang paling radikal ialah Taliban di Afghanistan, yang dalam istilah yang diperkenalkan oleh Hasan Al-Bana sendiri disebut dengan “Islamiyah”, atau dalam wacana Islam kontemporer disebut “Islamisme”, yakni Islam yang totalitas dan memasuki wilayah politik atau Negara serta seluruh ranah kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Fenomena “Arabisasi” atau gaya Timur Tengah yang dibawa oleh MMI dapat ditunjukkan dalam bentuk manifestasi: *Pertama*, pemakaian simbol-simbol berbahasa Arab di ruang publik yang mengindikasikan Islam sama dengan Arab. *Kedua*, penisbahan atau mempertautkan diri dengan gerakan serupa di Timur Tengah atau kawasan lain seperti Taliban (Afghanistan).

Pertautan MMI dengan Taliban tampak dalam dimensi psikologi sosial tertentu, karena sebagian aktivisnya pernah menjadi mujahidin (sukarelawan jihad) di Afghanistan. *Ketiga*, mengambil atau menunjukkan corak pemurnian yang scriptural model Wahabi baik dalam praktik keagamaan maupun prototipe penyatuan (aliansi) agama dan negara sebagaimana dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan rezim Saudiyah yang menghasilkan kekuasaan dinasti/kerajaan Islam Arab Saudi saat ini.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nashir, “Gerakan Islam., p. 71-72.

<sup>14</sup> *Ibid.* p. 77.

### **Strategi Gerakan Formalisasi Syariat Islam Majelis Mujahidin Indonesia**

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan dan menjadikannya sebagai rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut MMI melakukan strategi mobilisasi, konsolidasi gerakan formalisasi syariat Islam, dan strategi menggalang aliansi (*tansiq*). Strategi tersebut diimplementasikan dengan gerakan/mobilisasi organisasi mujahidin dari berbagai lapisan, termasuk dari organisasi-organisasi Islam yang sudah berkembang di tingkat nasional maupun daerah dengan tujuan memperluas gerakan ke berbagai kelompok dan golongan umat Islam.

MMI juga melakukan jaringan gerakan/aliansi melalui kongres-kongres umat Islam di daerah, atau menggunakan saluran-saluran konvensional seperti tabligh akbar dan pengajian-pengajian untuk penegakkan syariat Islam di Indonesia. MMI juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi penerapan syariat Islam dengan cara damai, mendorong kesiapan umat Islam, dan melakukan penyadaran umat Islam untuk menjalankan dan memperjuangkan syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan.<sup>15</sup>

Strategi lain yang dipakai MMI dalam mensosialisasikan gagasan-gagasannya melalui cara nonkonvensional seperti seminar, debat publik, dan publikasi/tulisan media massa serta menerbitkan bermacam-macam buku melalui *Wibdah Press* yang bermarkas di Yogyakarta. Dari strategi mobilisasi, konsolidasi, dan aliansi ini terlihat bahwa gerakan formalisasi syariat Islam yang dilakukan MMI lebih banyak bermula dari gerakan jalur atas dan bersifat elitis, karena lebih didominasi oleh pergulatan para elite dan aktivisnya di berbagai kelompok pergerakan ketimbang sebagai sebuah gerakan massa umat

---

<sup>15</sup> Irfan Suryahardi Awwas, *Risalah*, p. 135-136.

Islam. Hal itu dapat dikonfirmasi dengan dukungan umat Islam yang masih belum meluas baik di tingkat nasional.

### **Konteks Gerakan Formalisasi Syariat Islam Majelis Mujahidin Indonesia**

Munculnya gerakan formalisasi syariat Islam khususnya yang berorientasi pada ideologi politik Islam (Islamisme) dan Islam berorientasi politik (Islam politik) dengan sifatnya yang regresif dan antagonis seperti MMI merupakan akibat dari kondisi-kondisi tertentu yang bersifat sosiologis yang memberikan dorongan sekaligus menjadi lahan subur bagi tumbuhnya gerakan Islam yang cenderung melakukan Islamisasi yang formalistik di ranah politik atau negara dengan karakternya yang legalistik-formalistik, doktriner, dan militan. Berikut sejumlah kondisi dan aspek yang menjadi bagian dari konteks kelahiran dan perkembangan gerakan formalisasi syariat yang menampilkan karakter dan orientasi ideologis yang ditampilkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia.

#### **1. Siklus Krisis**

Dalam konteks kelahiran gerakan formalisasi syariat Islam seperti yang diperjuangkan Majelis Mujahidin Indonesia, siklus krisis itu berkaitan dengan munculnya pergantian rezim pemerintahan Orde Baru dengan Orde Reformasi yang secara umum menandai krisis politik nasional, dan terbukanya iklim politik baru bagi aspirasi umat Islam Indonesia. Siklus krisis tersebut juga bersamaan dengan krisis sosial dalam bentuk pergeseran nilai sosial-budaya terutama yang menyangkut krisis moralitas yang sangat sensitif bagi umat Islam karena berkaitan langsung dengan pembangunan akhlak umat dan bangsa.

Krisis sosial tersebut membangkitkan kesadaran tentang pentingnya peneguhan kembali nilai-nilai agama yang diyakini memiliki kepastian, yang menemukan tempat yang legalistik-formalistik dan doktriner dalam alternatif penerapan syariat Islam.

Kesadaran teologis tentang krisis tersebut kemudian bersenyawa dengan kesadaran ideologis Islam ketika berhadapan dengan ideologi sekularisme, liberalisme, dan lain-lain yang juga menunjukkan kehadirannya di tengah krisis yang memicu persaingan ideologis dengan kelompok Islam secara lebih kompleks. Krisis tersebut selain mencerabut pada kelompok sosial tertentu dari identitas dan kondisi yang normal, juga dapat memperteguh identitas suatu kelompok, yakni terjadinya penguatan politik identitas (*political identity*).

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang lahir melalui kongres pertamanya tahun 2000 menandakan sebagai bentuk dari kehadiran untuk mengatasi krisis dengan jalan melegal-formalkan syariat Islam. Dalam maklumat “Inspirasi Kongres”, setelah membahas kondisi Indonesia yang mengalami berbagai gejolak sejak awal kemerdekaan hingga krisis yang melahirkan era Reformasi, para aktivis yang melahirkan Majelis Mujahidin di Kongres itu sampai pada kesimpulan antara lain bahwa terjadinya berbagai bencana yang menyengsarakan rakyat Indonesia secara umum, dan umat Islam khususnya lahir dari kondisi masyarakat dan pemerintahan yang tidak berlaku hormat kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik pemerintah maupun rakyatnya, sama-sama tidak memiliki rasa hormat terhadap Syariat Islam.

Bahkan rakyat dan pemerintah Indonesia, meski mayoritasnya adalah Islam, selain tidak memahami dengan benar mengenai fungsi dan kedudukan syariat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka juga tidak memiliki militansi yang signifikan untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di samping tidak mengerti syariat Islam, mereka juga tidak yakin bahwa syariat Islam merupakan satu-satunya solusi mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan. Sikap seperti itulah yang merupakan sebab dari segala bencana.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nashir, “Gerakan Islam., p. 84.

Menurut gerakan Majelis Mujahidin, ketidak mengertian tentang tentang fungsi syariat Islam dan ketidakmauan para pemimpin dan kalangan elite lainnya untuk menegakkan syariat Islam, adalah dasar segala bencana. Oleh karena itu, apa saja yang mereka rumuskan sebagai kebijakan, cenderung tidak adil, represif dan merugikan rakyat banyak.<sup>17</sup>

Kompleksitas masalah sebagaimana di atas, oleh Majelis Mujahidin dibingkai dalam ideologi dan *framing* sehingga melatari pelbagai variasi kondisi dan solusi bertemu dengan penjelasan psikologis partisipan Muslim lain dan mendorongnya untuk ikut serta dalam gerakan Majelis Mujahidin.

Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa dalam perspektif psikologi sosial, yang melatari pembingkaian/*framing* gerakan aktivisme Islam –seperti Majelis Mujahidin Indonesia-- adalah perasaan tidak adil atas perlakuan terhadap suatu kelompok partisipan, identitas kelompok yang mendefinisikan “kita” sebagai korban ketidakadilan oleh kelompok sosial lain, rezim, dan agensi. Pada kelanjutannya, perasaan tidak adil tersebut menyebabkan munculnya *deprivasi relative*, yakni perasaan tertinggal, terbelakang, lemah, antara kelompoknya dibanding kelompok lain, atau realitas *sui generis* yang dialami sekarang dibanding keadaan yang dipersepsikan lebih baik sebelumnya. Sebut saja perasaan ketertinggalan Islam dibanding kelompok sosial-keagamaan lain. Perasaan ini dirasakan bersama oleh suatu kolektivitas umat karena Islam sebagai identitas.<sup>18</sup>

## 2. Kebangkitan Agama

Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia dalam kehadirannya memperjuangkan pelegal-formalan syariat Islam yang muncul di era

---

<sup>17</sup> Irfan Suryahardi Awwas, *Risalah*, p. xxiv. Bandingkan dengan *Ibid*, 85.

<sup>18</sup> Burhanuddin Muhtadi, “Agama dan Sekularisme di Ruang Publik: Pengalaman Indonesia”, *Makalah* Diskusi di Komunitas Salihara, Jl. Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, (Rabu 26 Januari 2011), p. 5. Makalah diakses dari [www.scribd.com/media](http://www.scribd.com/media), akses 10 September 2011.

Reformasi terkategori mewakili gejala kebangkitan agama. Agama bangkit dan menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan dan penyelamatan atas situasi krisis yang dianggap parah, terutama yang berkaitan dengan kondisi moral dan sikap hidup masyarakat.

Fenomena kebangkitan agama atas situasi krisis biasanya termanifestasi dalam gerakan revitalisasi agama (*Religious Revitalization*) dan gerakan penyelamatan (*Redemptive Movements*). Gerakan seperti ini selain bercorak Millenari atau Messianistik yang membayangkan masa depan yang penuh kesejahteraan, juga berorientasi ideologis karena memerlukan dukungan massa (umat) beragama yang fanatik dalam mencapai tujuan mendorong atau sebaliknya menolak perubahan serta mengeluarkan umat manusia dari krisis sesuai dengan system keyakinan keagamaan yang dianutnya.<sup>19</sup>

Majelis Mujahidin menumbuhkan pandangan tentang situasi umat dan masyarakat yang dianggap dekaden (rusak, menyimpang) karena produk sistem kafur, manusia kehilangan arah (disorientasi) dalam hidupnya, sehingga memerlukan kehadiran agama sebagai pembawa “kanopi suci” (*the sacred canopy*).<sup>20</sup> Karena itu, MMI muncul untuk menyelamatkan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya dari kehancuran melalui penegakkan syariat Islam yang dapat memberikan kepastian nilai dan normal dalam hidup dari keterombang ambingan.

Syariat Islam dan Negara Khilafah diposisikan sebagai bentuk lain atau personifikasi yang bersifat impersonal dari “ratu adil” atau “imam mahdi” yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari zaman edan.

Dalam menghadapi kenyataan hidup yang penuh krisis itu MMI menawarkan syariat Islam sebagai obat mujarab dengan sikap kembali pada ajaran Islam yang ideal di masa lampau (*salafiyah*) dengan

---

<sup>19</sup> Michael Adas, *Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa*, terjemahan (Jakarta: Rajawali Press, 1988), p. xvii. Bandingkan dengan Nashir, “Gerakan Islam., p. 86.

<sup>20</sup> *Ibid.*

sikap yang cenderung konservatif sebagaimana karakter neo-Wahhabiyah dan neo-revivalisme Islam. Karena itu, MMI lebih merupakan atau menampilkan gerakan keagamaan yang bercorak penyelamatan di tubuh umat Islam sendiri (*ibda' binafsi*) daripada sebagai gerakan reformasi atau revitalisasi (*revitalization movements*) untuk pembaruan atau pembaruan. Jika gerakan-gerakan Islam Salafiyah atau Revivalisme bercorak reformis atau modernis di awal abad ke-20 mengumandangkan kebangkitan Islam dengan melakukan gerakan pemurnian sekaligus pembaruan, namun dalam Majelis Mujahidin lebih kepada gerakan pemurnian dan penyelamatan tanpa pembaruan, bahkan cenderung antipembaruan.<sup>21</sup>

Bagi kelompok gerakan formalisasi syariah seperti Majelis Mujahidin, Indonesia era reformasi mengalami krisis lebih-lebih dalam bidang moral. Sedangkan ideologi-ideologi dunia seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, sekularisme, liberalisme, dan isme-isme lainnya telah gagal dalam memecahkan krisis multidimensi dan dalam membawa kedamaian serta keselamatan umat manusia. Kegagalan itu bersifat mendasar karena kehidupan saat ini dibangun dan dipimpin oleh sistem "*man made*" (buatan manusia), bukan sistem produk Ilahi sebagaimana halnya syariat Islam. Karena itu, hanya dengan Islam-lah, lebih khusus lagi syariat Islam dan kekhilafahan Islam, umat manusia dapat dibebaskan dari krisis dan menuju kehidupan yang damai, adil, sejahtera, dan selamat di dunia dan akhirat.<sup>22</sup>

Dalam kasus gerakan formalisasi syaria'ah seperti MMI ini, karakter gerakan revitalisasi atau lebih khusus lagi gerakan penyelamatan memang lebih pada corak nostalgik, sektarian, dan revivalis di bawah paham dan keyakinan salafiyah yang bercorak ideologis. Lebih dari itu, jika dalam gerakan yang bercorak pemberontakan menggunakan kekerasan, dalam gerakan millenari

---

<sup>21</sup> *Ibid.* p. 87.

<sup>22</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002), p. 6 dalam Nashir, "Gerakan Islam.", p. 88.

mengambil jalan pasif atau menarik diri dari kehidupan. Dengan idealisasi Islam di masa lampau, gerakan formalisasi syariat Majelis Mujahidin Indonesia menawarkan syariat Islam sebagai solusi untuk masa depan yang dipandang cerah, sebagaimana visi millenari mengenai negara Khilafah atau negara Islam untuk mewujudkan “*baladatan thayyibatun wa rabbun ghafūr*”, negara yang baik (aman, damai, adil, sejahtera) yang memperoleh ampunan Tuhan sebagaimana menjadi cita-cita ideal masyarakat Muslim di seluruh penjuru dunia.<sup>23</sup>

### 3. Konflik/Perlawanan Ideologis

Gerakan formalisasi syariat Islam sebagaimana yang diusung Majelis Mujahidin Indonesia menunjukkan sikap militan yang memperoleh ruang subur dalam arena konflik teologis dan konflik ideologis terhadap rezim pemerintahan yang dianggap sekuler di Indonesia, atau dengan pihak lain yang dianggap memusuhi Islam dan anti-syariat Islam, baik dari dalam tubuh umat Islam maupun dan lebih-lebih non- Islam. Pola ini seakan merupakan cetak-ulang dari konflik kelompok Islam versus kalangan komunis dan nasionalis-sekuler sebagaimana terjadi pada gerakan Islam era tahun 1920-an, 1930-an, 1945, dan 1950-an dalam sejarah perkembangan Islam yang bercorak ideologis. Tetapi dalam kasus gerakan formalisasi syariat Islam seperti MMI terdapat musuh baru yakni sesama umat Islam (Islam moderat dan liberal) yang di masa lampau tidak muncul.<sup>24</sup>

Hal ini tampak pada adanya *frame* konflik atau perlawanan ideologi, yakni apa yang disebut oleh mereka sebagai ideologi Islam melawan ideologi-ideologi *kufur* buatan manusia. Ideologi-ideologi kufur buatan manusia itu antara lain kapitalisme, sosialisme, komunisme, sekularisme, yang selain bertentangan dengan Islam juga dianggap telah gagal dalam membawa kehidupan umat manusia ke arah yang beradab.

---

<sup>23</sup> Nashir, “Gerakan Islam., p. 84.

<sup>24</sup> *Ibid.* p. 85.



Majelis Mujahidin Indonesia memandang bahwa kehadirannya dalam memperjuangkan penegakkan syariat Islam di Indonesia karena rezim pemerintahan yang dipimpin kaum nasionalis sekuler sejak Orde Lama hingga Orde Baru telah gagal membangun Indonesia yang aman, tenteram, adil, sejahtera, dan belakangan dilanda krisis atau bencana. Oleh karena itu, Majelis Mujahidin Indonesia menunjukkan sikap ideologis sebagai berikut:

- a. Menolak segala bentuk sekularisasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Menolak segala bentuk neokapitalisme, neokolonialisme, dan neoimperialisme terhadap bangsa dan negara Indonesia, baik melalui berbagai program bantuan, kerjasama bilateral, maupun melalui berbagai kerjasama multilateral atau ikut campurnya pihak asing terhadap persoalan dalam negeri secara langsung atau tidak langsung;
- c. Menolak neo-Nasakom (nasional, komunis, dan agama) dalam bentuk Nasasos (nasional, agama, dan sosialis) atau Nasapor (nasionalis, agama, dan oportunis) yang antara lain menjiwai lahirnya beberapa partai politik di era reformasi;
- d. Menolak segala macam kegiatan akademis yang bertujuan mencari pembenaran, bahwa semua agama sama saja;
- e. Menolak gagasan kerukunan umat beragama yang bersifat mengaburkan nilai-nilai ajaran Islam tentang ketauhidan dan keunggulan sistem Islami;
- f. Menolak gagasan negara sekuler sebagai dasar negara yang berhak mengatur tata kehidupan rakyatnya yang beragama Islam;
- g. Menolak doktrin demokrasi, republik, sistem serta bentuk pemerintahan produk paham kafir, dan menyerukan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan sistem pemerintahan *syura* dan bentuk negara Khilafah;

- h. Menolak dengan tegas ideologi gender, dan menolak perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, serta jabatan Imamatul Ummah;
- i. Menyerukan kepada kaum muslimin untuk menolak orang-orang non-muslim menduduki jabatan-jabatan *Imāmatul Ummah*, selama orang Islam sendiri mampu.<sup>25</sup>

Konflik/perlawanan MMI terhadap kelompok Islam lain yang dianggap anti-syariat Islam adalah dengan menganggap kelompok Islam lain tersebut sebagai murtad (*kafir i'tiqadi*). Mereka menolak Islam hanya substansi tanpa kulit luar (formalistas).

MMI memandang bahwa musuh Islam memang bukan hanya kaum zionis, sekularis, salibis, atheis, dan paganis (penyembah berhala) saja. Tetapi mereka juga memandang bahwa yang beragama Islam tetapi menolak dan ikut menghujat para pejuang Islam syariat sebagai musuh Islam. Menurut mereka, gejala orang non-Islam dan orang Islam yang anti syariat Islam dan para pejuang (mujahidin) Islam itulah sebagai penabuh Perang Salib Jilid II yang sangat halus dan sistematis dalam menghancurkan Islam.<sup>26</sup> Pandangan yang meletakkan orang Islam, selain non-Islam, yang anti syariat Islam sebagaimana dikemukakan itu lebih jauh dinyatakan bahwa kelompok anti syariat Islam tersebut sebagai penghancur Islam yang disebut teroris.

Ketegangan hubungan tersebut tampaknya juga bukan semata-mata bersifat teologis atau ideologis, bahkan dalam masa-masa kritis masuk ke wilayah politik atau kekuasaan politik, yang menggambarkan jarak antara kelompok-kelompok Islam tersebut dengan negara. Dari posisi yang demikian maka akan terjadi kecenderungan ekstrem. Bahwa semakin tinggi tingkat penolakan terhadap formalisasi syariat

<sup>25</sup> Irfan S. Awwas, "Penegakan Syariat Islam di Indonesia: Jalan Menuju Progresifitas", dalam *Intifada*, Edisi Khusus (Labda Shalahuddin Yogyakarta: Oktober, 2004), p. 158. Bandingkan dengan *Ibid.*, p. 89-90.

<sup>26</sup> Luthfi Bashari, *Musub Besar Ummat Islam: Zionisme, Sekularisme, Atheisme, Salibisme, JIL, Oportunisme* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), p. 100. Lihat juga *Ibid.*, p. 91.

Islam dari kelompok Islam lain maka akan semakin tinggi militansi gerakan-gerakan seperti MMI dan lainnya untuk memperjuangkan formalisasi syariat tersebut, karena yang dihadapi sama dengan musuh besar Islam dan umat Islam.

Dalam konteks perjuangan kekuasaan (*power struggle*), gerakan politik keagamaan memang tidak akan bebas dari kepentingan-kepentingan pragmatis yang sebagaimana logika politik pada umumnya. Jarak dengan kekuasaan, yakni dalam hubungan dengan rezim pemerintah yang berkuasa, cenderung memberi kesan akomodasi atau konfrontasi.

Kehadiran gerakan formalisasi syariat yang mengusung ideologi Islam sebagaimana MMI juga tumbuh dalam konteks ketegangan struktural berhadapan dengan rezim pemerintahan yang dipandang tidak memihak Islam atau bahkan membawa muatan ideologi sekuler yang bertentangan dengan Islam. Perlawanan ideologis dari kelompok Islam syariat tampaknya bukan pada siapa rezim penguasa, tetapi lebih pada karakter dan sifat rezim dengan bangunan negara yang mbingkainya, yang dianggap mewakili sistem sekuler dan sistem kufur yang berbeda dan berhadapan dengan sistem Islam yang mereka perjuangkan. Konstruksi konflik ideologis yang semacam itu tentu tidak akan pernah usai karena selalu akan memperoleh legitimasi teologis dan peluang politik yang menjadi kerangka gerakan untuk terus mengabadikan pertentangan dan perlawanan ideologis.

Trauma atau pengalaman sosiologis perang dan perlawanan semacam itu dengan sendirinya membentuk psikologi politik traumatik di sebagian kalangan Islam, dan membangkitkan kembali kecenderungan sikap militan dan bahkan radikal. Sikap militan dan radikal itu kemudian seolah menemukan pertambatan pada paham Islam bercorak syariat yang berwatak legalistik-formalistik, doktriner, dan ideologis. Akhirnya sejarah perang dan sejarah perlawanan itu bukan saja membentuk kesadaran sosiologis tetapi sekaligus kesadaran keagamaan yang membentuk “dunia dalam” (*inner world*) yang penuh

kewaspadaan, kecurigaan, dan sikap reaksioner yang berlebihan. Artinya, kondisi psikologis yang traumatik memperoleh pembingkaihan (*framing*) keagamaan yang rigid, sehingga dengan mudah sekali sensitif terhadap pihak lain yang dianggap mengancam Islam, lebih-lebih jika datang dari Barat dan mengindikasikan kepentingan Barat yang dianggap kafir, sekuler, liberal, dan memusuhi Islam.

#### 4. Marjinalisasi Sosial

Kehadiran kelompok Islam syariat seperti Majelis Mujahidin dapat dilihat dari posisi sosial kelompok ini dalam struktur kehidupan masyarakat secara luas. Majelis Mujahidin merupakan kelompok baru dalam peta sosiologis umat Islam, yang secara kelembagaan tergolong kecil bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Kelompok seperti MMI ini merasakan ada jarak sosial tertentu, bahwa mereka memiliki harapan besar kepada kelompok Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama untuk memainkan peran mengartikulasikan aspirasi umat Islam kepada pemerintah secara lebih optimal termasuk dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam, namun tak terakomodasi. Kelompok ini hingga batas tertentu bahkan menganggap organisasi-organisasi Islam yang besar itu tidak berhasil dalam melakukan Islamisasi kehidupan, karena itu mereka tampil memperjuangkannya dengan mengajak untuk membangun *tansyiq* atau aliansi gerakan.

Selain kondisi terisolasi secara politik, ekonomi dan kultural memang menjadi pelataran lain yang menumbuhkan proses reproduksi gerakan formalisasi syariat seperti Majelis Mujahidin. Formalisasi Islam menjadi medan pertempuran kelas dari mereka yang mengalami isolasi di berbagai bidang kehidupan, kendati aktivis gerakan formalisasi syariat atau gerakan formalisasi Islam menepis asumsi ini.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Irfan Suryahardi Awwas, "Halusinasi Penentang Syariat Islam", Opini, dalam *Republika* (29 November 2004), p. 5. Irfan yang juga ketua Lajnah Tanfidziyah MMI

Kondisi psikologis tersisih, tertindas, terasing, dan trauma politik masa lalu sedikit atau banyak dapat memberi warna terhadap corak keagamaan yang militan. Dari keterasingan kemudian melakukan perjuangan untuk bangkit kembali ke pentas nasional dengan cara mencetak-ulang memori kolektif seputar kegagalan Piagam Jakarta tahun 1945 dan Konstituante tahun 1959. Hal ini terlihat dari sejumlah elite Majelis Mujahidin yang pernah mengalami kehidupan dipenjara pada masa rezim Orde Baru karena terlibat gerakan-gerakan yang dianggap subversi dan menentang Pancasila sebagaimana yang menjadi ciri rezim otoritarian kala itu.

Dari empat aspek yang terkait dengan konteks kemunculan gerakan formalisasi syari'ah di Indonesia seperti Majelis Mujahidin tersebut, yakni siklus krisis, revitalisasi/kebangkitan agama, konflik/perlawanan ideologis, dan marjinalisasi sosial; maka *setting* sosial atau konteks tempat kelahiran dan pertumbuhan gerakan ini bersifat kompleks. Kompleksitas tersebut melibatkan aspek-aspek teologis atau ideologis hingga ke aspek-aspek pragmatis atau kondisional, baik di lingkungan umat Islam sendiri, maupun dengan struktur kehidupan nasional dan global.

Pertautan antara dimensi ideologis dan pragmatis atau antara ranah ajaran dengan realitas sosiologis yang berada dalam konstruksi dan struktur gerakan formalisasi syari'ah saling bersenyawa dalam proses "*crosscutting of interest*" (saling silang kepentingan) tergantung pada momentum-momentum sosial yang dihadapinya.

Situasi internal umat Islam dan kehidupan nasional maupun global yang dihadapi oleh kelompok Islam syariat dikonstruksikan sebagai kondisi yang krisis, kufur, tidak Islami, dan mengancam Islam.

---

dalam artikel opininya tersebut menolak tuduhan/pendapat tulisan Ahmad Najib Burhani di Harian yang sama (19 November 2004) yang antara lain menyatakan bahwa tuntutan penerapan syari'at Islam sebagai solusi total dating dari gagasan komunitas muslim radikal yang miskin, tersisihkan, dan putus asa yang menunggu-nunggu makhluk (Ratu Adil, yakni syari'at Islam) yang mampu mengangkat derajat hidup mereka, karena bagi aktivis MMI ini tuntutan dan perjuangan menegakan syari'at Islam merupakan sebagai solusi total "adalah bagian dari keimanan Islam".

Karena itu diperlukan gerakan Islam yang secara tegas dan puritan untuk membawa panji ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat melalui gerakan penegakan syariat Islam secara formal ke ranah negara. Jalan tersebut dianggap sebagai satusatunya alternatif menuju Negara yang serba baik dan memperoleh ampunan Tuhan (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*) sebagaimana dicita-citakan Islam.

Gerakan formalisasi syariah Islam Majelis Mujahidin Indonesia yang memperjuangkan pelembagaan syariat dan membangun sistem Islam dalam Negara era reformasi di Indonesia mengalami reproduksi yang diwarnai diektika yang beragam. Dialektika reproduksi itu berlangsung dalam ranah teologis antara pemurnian agama dengan kenyataan hidup yang kompleks, sedangkan secara ideologis terkait dengan berbagai kelompok sosial baik di tubuh umat Islam sendiri maupun masyarakat. Artinya, jika dikaji dalam perkembangan gerakan Salafisme atau Salafiyah, gerakan ini sebenarnya memiliki *nasab* ideologis dengan gerakan Salafiyah yang muncul abad ke- 20-an, tetapi dengan corak yang berbeda.

Dalam gerakan formalisasi syari'ah yang memiliki nasab teologis dan ideologis pada modernisme Islam, sebagaimana ditunjukkan Majelis Mujahidin lebih menunjukkan karakter yang militan meski tidak radikal.<sup>28</sup> Majelis Mujahidin Indonesia bahkan dalam hal orientasi penerapan syariat sangat militan karena merujuk pada rezim Taliban sebagai model ideal Islam di abad modern ini.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Martin Van Bruinessen, "Komentar Prof. Martin Van Bruinessen", dalam Tim Editor Mujahidin, *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), p. 9.

<sup>29</sup> Dalam dialog Pimpinan Pusat Muhammadiyah diwakili Ahmad Syafii Maarif dan Asymuni Abdurrahman dengan pengurus Majelis Mujahidin Indonesia di markasnya Jl. Veteran Yogyakarta, sebagaimana di berbagai kesempatan diutarakan Ahmad Syafii Maarif, ketika bertanya tentang contoh negara yang ideal dalam menerapkan syari'at Islam, waktu itu KH. Abubakar Ba'asyir menunjuk Taliban di Afghanistan.

## Penutup

Kehadiran gerakan Islam yang memperjuangkan penerapan Islam secara formal dalam institusi negara/pemerintahan, membangun rumah politik bagi syariat Islam, dan lebih jauh lagi cita-cita memujudkan kekhilafahan Islam sebagaimana dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia menunjukkan bahwa Majelis Mujahidin muncul ke permukaan tidak semata-mata karena aspek-aspek yang bersifat situasional (konteks sosial, struktural, dan kultural) sebagaimana pada umumnya penelitian yang membedah fundamentalisme Islam. Tetapi Majelis Mujahidin Indonesia muncul karena dorongan keyakinan dan paham keagamaan yang ingin mencetak-ulang (reproduksi) tipe ideal Islam zaman Nabi dan generasi “*Salâf al-Shâlib*” (generasi terbaik sesudah Nabi) secara harfiah dan formal.

Majelis Mujahidin Indonesia juga menganut paham ideologis (Islamisme, Ideologi Islam) yang bertolak dari pandangan integralisme Islam, bahwa Islam harus diwujudkan secara *kaffah* (menyeluruh) dalam segenap aspek kehidupan, termasuk dalam institusi negara. Gerakan formalisasi syariat Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia karena memiliki keyakinannya yang kuat tentang syariat Islam (syar‘isme), menampilkan corak Islam yang serba harfiah, legalistik-formalistik, doktriner dan militan. Dengan semangat mengembalikan Islam murni (ideal) ke masa salaf dan membangun ideologi Islam, maka gerakan ini secara tipikal menampilkan karakter salafiyah ideologis.

Gerakan Islam seperti MMI merupakan penjelmaan dari reproduksi (cetak-ulang) Revivalisme dan Neorevivalisme Islam yang cenderung tradisional dan konservatif sebagaimana ditemukan dalam gerakan Wahhabiyah, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyyah di Taliban. Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia dalam perspektif psikologi sosial lahir dalam bingkai/*framing* perasaan tidak adil atas perlakuan terhadap suatu kelompok partisipan, identitas kelompok yang mendefinisikan “kita” sebagai korban ketidakadilan oleh

kelompok sosial lain, rezim, dan agensi. Perasaan ini dirasakan bersama oleh suatu kolektivitas umat karena Islam sebagai identitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Michael, *Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa*, terjemahan, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Awwas, Irfan Suryahardi, "Penegakan Syariat Islam di Indonesia: Jalan Menuju Progresifitas", dalam *Intifada*, Edisi Khusus, Labda Shalahuddin Yogyakarta: Oktober, 2004.
- , "Halusinasi Penentang Syariat Islam", Opini, dalam *Republika*, 29 November 2004.
- , *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Bashari, Luthfi, *Musub Besar Ummat Islam: Zionisme, Sekularisme, Atheisme, Salibisme, JIL, Oportunisme*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- Bruinessen, Martin Van, "Komentar Prof. Martin Van Bruinessen", dalam Tim Editor Mujahidin, *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.
- Hartono, "Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)", *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.
- Hudgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik*, terjemahan, Jakarta: Paramadina, 2002.



- Muhtadi, Burhanuddin, “Agama dan Sekularisme di Ruang Publik: Pengalaman Indonesia”, Makalah Diskusi di Komunitas Salihara, Jl. Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, (Rabu 26 Januari 2011), hlm. 5. Makalah diakses dari [www.scribd.com/media](http://www.scribd.com/media), akses 10 September 2011.
- Nashir, Haedar, “Gerakan Islam Syari‘at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia”, dalam *Jurnal Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, November 2006.
- Sawitri, Karuni Ayu “Membaca Politik Islam Indonesia Kontemporer”  
[http://nu.or.id/page/id/dinamic\\_detil/12/13749/Buku/Membaca\\_Politik\\_Islam\\_Indonesia\\_Kontemporer.html](http://nu.or.id/page/id/dinamic_detil/12/13749/Buku/Membaca_Politik_Islam_Indonesia_Kontemporer.html), akses 12 Desember 2011.
- [www.Arrahmah.com](http://www.Arrahmah.com), akses 10 Januari 2012.